

## Aksesibilitas Pemustaka Penyandang Disabilitas Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Standar IFLA Checklist

Dimas Muhammad Pambudi

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Padang

Nurizzati Nurizzati

Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Padang

**Abstract** . This research aims to analyze the accessibility of library and archives services for people with disabilities in the West Sumatra Provincial Archives and Library Service, the accessibility of users with disabilities in the West Sumatra Province Archives and Library Service based on IFLA Checklist standards, and the obstacles faced in fulfilling accessibility for people with disabilities at the Provincial Archives and Library Service West Sumatra. This research uses qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques use observation, interviews and documentation studies. The data validation technique uses triangulation, namely triangulation of data sources. The data validation technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of this research are as follows. Firstly, accessibility at the West Sumatra Provincial Archives and Library Service has not yet been fully realized because there are still many shortcomings found in the implementation of accessibility services for people with disabilities, such as the ease of library users in meeting their needs has not been fully realized and the only library material collections available are books with braille printing. Second, accessibility at the West Sumatra Archives and Library Service based on the IFLA Checklist Standard reached 40.54%. Thus, it can be said that accessibility for users with disabilities in the Archives and Library Service is still not in accordance with the IFLA Checklist standards. The research results from the IFLA Checklist standard amounted to 111 items which were 45 items which were appropriate while which were 66 items which were not appropriate. Third, the obstacles faced by the West Sumatra Province Archives and Library Service in fulfilling accessibility for disabled users from various aspects such as the lack of available funding, lack of technical knowledge of implementation, and limited human resources who are competent in providing services for users with special needs or disabilities.

**Keywords:** Accessibility, Disability, Library

**Abstrak** . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, aksesibilitas pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan standar IFLA Checklist, dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber data. Teknik pengabsahan data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya terwujud hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti kemudahan pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya belum sepenuhnya terwujud dan koleksi bahan pustaka yang tersedia hanya buku dengan cetakan braille. Kedua, aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat berdasarkan Standar IFLA Checklist mencapai angka 40,54%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksesibilitas bagi pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih belum sesuai dengan standar IFLA Checklist. Hasil penelitian dari standar IFLA Checklist yang berjumlah 111 item yang sesuai terdapat 45 item sedangkan tidak sesuai terdapat 66 item. Ketiga, kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pemenuhan aksesibilitas pemustaka difabel dari berbagai aspek seperti minimnya pendanaan yang tersedia, kurangnya pengetahuan teknis pelaksanaan, dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus atau difabel.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Perpustakaan

Received Januari 30, 2024; Accepted Februari 21, 2024; Published Februari 29, 2024

\* Dimas Muhammad Pambudi

## **PENDAHULUAN**

Aksesibilitas merupakan karakteristik penting dalam ruang lingkup geografi, termasuk dalam konsep pelayanan perpustakaan. Aksesibilitas sering menjadi tujuan penting dari merencanakan transportasi, rencana penggunaan lahan, dan desain bangunan (Church & Marston, 2003). Salah satu aksesibilitas yang penting adalah aksesibilitas secara publik. Arti dari publik dalam konsep adalah sebagai 1) keseluruhan dan 2) populasi pada sebuah negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas penting dalam sebuah aksesibilitas ruang publik adalah keterbukaannya terhadap keseluruhan populasi (Kosova dalam Yılmaz, 2018).

Adapun dalam masalah aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas, dampaknya juga dirasakan secara sosial. Menurut PBB (2016), kurangnya aksesibilitas dan mobilitas membawa beban inklusif dan partisipasi orang dengan disabilitas secara keseluruhan dalam pembangunan ekonomi maupun sosial.

Setiap manusia yang lahir akan memiliki kondisi yang berbeda-beda dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda, termasuk bentuk fisik, latar belakang, cara berpikir, serta kebutuhan akan informasi yang berbeda-beda. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, hanya saja proses dalam memenuhi kebutuhan tersebut yang berbeda. selain proses yang berbeda, fasilitas yang dibutuhkan pun akan berbeda setiap orangnya, begitupun dengan layanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29,61 persen hanya lulusan sekolah dasar sebanyak 13,02 persen tidak atau belum pernah mengenyam Pendidikan formal. Keterbatasan akses Pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta akses pada proses perencanaan kebijakan pembangunan merupakan tantangan yang harus dihadapi penyandang disabilitas di tengah upaya pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata.

Perpustakaan memiliki peran aktif dalam menjawab tantangan tersebut. Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perpustakaan tidak hanya menyediakan sumber informasi dan pengetahuan, tetapi juga kegiatan bermanfaat serta turut ambil bagian memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatnya penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membangun komitmen dan dukungan peserta untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas (Penyandang Disabilitas, 2016), dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Penyandang Disabilitas, 2016), dijelaskan bahwa pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Aksesibilitas disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak pelayanan.

Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada perpustakaan umum. Menurut Lasa (2013) Perpustakaan Umum merupakan perpustakaan untuk masyarakat luas untuk pendidikan sepanjang hayat tanpa membedakan latar belakangnya. Jadi perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memberikan layanan bagi masyarakat umum tanpa membedakan latar belakangnya

Penelitian ini memilih aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dikarenakan pemahaman terhadap aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan. Fasilitas pendukung yang disediakan di tempat pelayanan publik termasuk perpustakaan masih sangat minim disediakan.

Aksesibilitas dan inklusi penyandang disabilitas adalah hak-hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang. Pemenuhan hak tersebut selain sebagai tujuan, juga merupakan prasyarat untuk terpenuhinya hak-hak lainnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebutuhan Informasi**

Kebutuhan informasi timbul disebabkan karena kesenjangan pengetahuan seseorang, maka orang tersebut akan memenuhi kebutuhan informasinya agar segera terpenuhi (Batley, 2007).

Wilson menyatakan bahwa munculnya kebutuhan manusia dikategorikan menjadi tiga yaitu; kebutuhan fisiologis, kebutuhan afektif, dan kebutuhan kognitif. Sewaktu seseorang

terdorong untuk mencari informasi semua faktor fisiologis, afektif maupun kognitif akan menentukan bagaimana seseorang berperilaku mencari informasi.

### **Perpustakaan Umum**

Perpustakaan umum merupakan fasilitas pendidikan non-formal yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, yang memiliki tugas untuk menghimpun, memelihara, dan mendayagunakan koleksi perpustakaan untuk kepentingan masyarakat. Perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan yang demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan pendidikan seta perbedaan lainnya (Sutarno, 2008).

Perpustakaan umum memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu: fungsi Pendidikan, untuk mempromosikan dan mendukung Pendidikan selain sekolahm universitas dan pusat kebutuhan penelitian; pusat informasi, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik; preservasi kebudayaan, menyediakan dan menyimpan pesan tentang budaya masa lalu, masa kini, dan perkembangan budaya masa depan; fungsi rekreasi, perpustakaan menyediakan bahan yang menyenangkan untuk dibaca oleh masyarakat untuk mengisi waktu luang.

### **Aksesibilitas**

Menurut Demartoto (dalam Putri, 2011) ada dua macam aksesibilitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua aspek aksesibilitas ini saling melengkapi dan penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh.

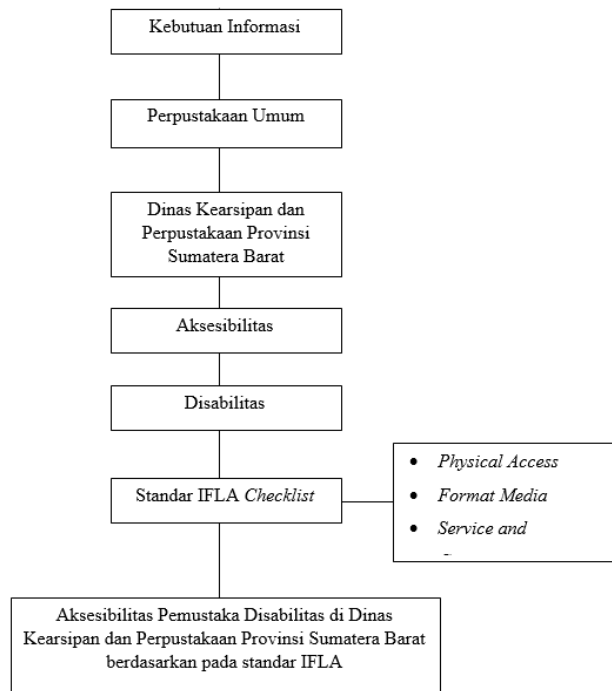
### **Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang bearti cacat atau ketidak mampuan.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 (Penyandang Disabilitas, 2016) disebutkan bahwa pengertian dari disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya

## Kerangka Konseptual

Pada Penelitian ini, peneliti membahas mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada standar IFLA Checklist. Kerangka konseptual ini memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian secara terstruktur, sehingga tidak keluar dari rancangan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:



## METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Bog dan Taylor (dalam Moleng, 2010) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dengan cara mendeskripsikan ke bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Menurut Sugiyono (2017), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Pada penelitian ini yang menjadi fokus studi kasusnya adalah bagaimana layanan aksesibilitas untuk pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, untuk acuan dalam menganalisis aksesibilitas perpustakaan pada penelitian ini dengan menggunakan standar

IFLA Checklist, melalui penjelasan deskriptif sehingga dapat dijawab secara realita terhadap fenomena apa yang terjadi di lapangan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan kurang tepat jika dituangkan dalam bentuk angka angka.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menguraikan data dalam bentuk kata-kata, dan gambar-gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Menurut Moeleng (2010), Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan kondisisuatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti dapat menejelaskan gambaran serta fakta di lapangan terhadap kondisi dan juga menganalisis aksesibilitas bagi pemustaka disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Standar IFLA Checklist

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini, hasil penelitian dibahas sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang terdiri dari (1) Aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, (2) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan standar IFLA *Checklist*, dan (3) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tidak berpedoman pada standar IFLA *Checklist*, sudah semestinya dalam pelaksanaan perpustakaan yang ramah disabilitas, standar IFLA *Checklist* digunakan sebagai satu-satunya standar yang menjadi pedoman. Oleh karena itu, Aksesibilitas Pemustaka Penyandang Disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat seharusnya mengikuti pedoman standar IFLA *Checklist* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan jenis pengunjung disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

### **1. Aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

#### **a. Akses Fisik**

Akses fisik bagi pengguna perpustakaan penyandang difabel belum memenuhi standar IFLA akses fisik, meskipun telah disediakan jalan khusus bagi difabel yang menggunakan kursi roda dan toilet khusus. Dari hasil observasi, terungkap bahwa aksesibilitas untuk penyandang difabel dalam mengakses lingkungan perpustakaan masih kurang, karena layanan untuk difabel saat ini baru difokuskan pada ruang khusus disabilitas. Seharusnya, perpustakaan menyediakan

*guiding block* atau lantai timbul untuk difabel tunanetra, namun tidak ditemukan keberadaan *guiding block* tersebut. Upaya peningkatan aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat bagi difabel baru mencakup ruang khusus, jalur khusus untuk kursi roda, tongkat bantu jalan dengan sensor dan speaker, serta koleksi bahan pustaka yang disesuaikan dengan kebutuhan difabel.

#### **b. Format Media**

Dalam konteks keterbatasan fasilitas perpustakaan untuk pengguna perpustakaan penyandang difabel, standar format untuk materi tersebut telah disediakan dan perpustakaan juga telah menyediakan buku *braille* untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam bentuk tulisan yang mana untuk saat ini jumlah buku dengan cetakan *braille* yang tersedia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 660 cetakan. Meskipun demikian, aksesibilitas layanan perpustakaan bagi pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, terutama dari segi koleksi bahan pustaka, belum sepenuhnya terpenuhi.

#### **c. Komunikasi dan Layanan**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam melayani masyarakat dalam pencarian informasi dengan fasilitas akses yang memadai, koleksi bahan pustaka yang cukup, dan layanan perpustakaan yang bersifat inklusif tanpa membedakan antara pengunjung. Pengunjung perpustakaan penyandang difabel dijamin akan mendapatkan perlakuan atau layanan khusus yang memudahkan mereka dalam mencari informasi. Namun dalam hal komunikasi pustakawan masih kurang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang khusus untuk pemustaka difabel, salah satunya adalah cara berkomunikasi dengan pemustaka penyandang tunarungu.

### **2. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar IFLA Checklist**

#### **a. Akses Fisik**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemustaka mulai dari akses fisik dan informasi bagi pemustakanya. Proses penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pengguna berorientasi terhadap kebutuhan pengguna. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat ditemukan berapa item yang tidak/belum sesuai dengan standar IFLA. Data kesesuaian ditemukan tingkat kesesuaiannya adalah 53,84%. Pada tabel hasil penelitian

mengenai butir akses fisik berdasarkan standar IFLA terdapat 52 item. Adapun item yang sesuai pada standar akses fisik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 28 item. Sedangkan akses fisik yang tidak sesuai adalah 24 item.

### **b. Format Media**

Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tersedia berbagai jenis koleksi yang dapat digunakan oleh pemustaka dalam memperkaya pengetahuan. Selain itu juga menjalankan tugas sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berikut akan dijelaskan kesesuaian format media informasi yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan standar IFLA. Dari data kesesuaian dari standar IFLA, diketahui bahwa tingkat kesesuaiannya adalah 23,07%. Pada tabel hasil penelitian mengenai elemen format dalam standar IFLA terdiri dari 13 butir elemen. Butir elemen yang sesuai dengan standar yaitu sejumlah 3 butir elemen sedangkan yang belum sesuai sejumlah 10 butir elemen. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat ditemukan beberapa item pada standar komponen format media yang tidak/belum sesuai dengan standar IFLA.

### **c. Layanan dan Komunikasi**

Dari data kesesuaian ditemukan bahwa tingkat kesesuaian adalah 30,43%, pada tabel hasil penelitian mengenai butir layanan dan komunikasi ditemukan yang data yang tertera terlihat bahwa standar IFLA terdapat 46 item. Standar yang sesuai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 14 sedangkan yang belum sesuai adalah 32 item. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat ditemukan beberapa item pada standar layanan dan komunikasi yang tidak/belum sesuai dengan standar IFLA.

Dari hasil penelitian tentang aksesibilitas perpustakaan bagi difabel di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, disajikan data dari keseluruhan komponen yang telah diteliti sesuai dengan standar IFLA. Dalam standar IFLA secara garis besar terdapat 3 komponen standar yaitu pertama, akses fisik yang terdiri dari 52 item standar. Dari 52 item yang sesuai sebanyak 28 sedangkan yang tidak sesuai sebanyak 24 item. Kedua, format media yang terdiri dari 13 item yang sesuai terdapat 3 item sedangkan yang tidak sesuai terdapat 10 item. Ketiga, layanan dan komunikasi yang terdiri dari 46 item yang sesuai terdapat 14 item sedangkan yang tidak sesuai ada 32 item. Tingkat aksesibilitas perpustakaan berdasarkan komponen didapatkan bahwa pada standar akses fisik mencapai 53,8% , standar format media mencapai 23% dan



pada standar layanan dan komunikasi mencapai standar 30,4%. Sedangkan data keseluruhan dari ketiga komponen standar IFLA yaitu sebagai berikut:

**Tabel Data Kesesuaian Standar IFLA**

No.	Standar IFLA	Jumlah Sesuai standar IFLA	Jumlah Tidak Sesuai Standar IFLA
1.	Akses Fisik	28	24
2.	Format Media	3	10
3.	Layanan & Komunikasi	14	32
Jumlah Item : 111 Sesuai : 45 Tidak Sesuai : 66		Tingkat Kesesuaian : $\frac{45 \times 100\%}{111} = 40,54\%$	

*Tabel 1 Data Kesesuaian Standar IFLA*

Dengan demikian hasil penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas perpustakaan difabel di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan masih belum sesuai atau dengan kata lain belum memenuhi standar IFLA. Hasil dari persentase diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari standar IFLA baru mencapai 40.54% sedangkan persentase tidak sesuai sebesar 59.45%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa persentase tidak sesuai lebih besar dari kesesuaian aksesibilitas bagi difabel di perpustakaan.

### **3. Kendala Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat**

Berbagai kendala yang dihadapi oleh institusi ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kendala eksternal dan kendala internal.

#### **a. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal berkaitan dengan dana yang diterima melalui APBD guna membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Data yang ada menunjukkan bahwa besaran dana untuk membiayai penyelenggaraan perpustakaan selama empat tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018-2022) setiap tahun sebesar rata-rata 6% dari dana yang diterima institusi, dan mengalami penurunan rata-rata 1,4% per tahun. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran dana untuk membiayai penyelenggaraan perpustakaan selama empat tahun terakhir selalu saja menurun, sedangkan alokasi dana dari APBD untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahun naik.

## b. Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Institusi adalah “kekurangan bawaan” dari SDM perpustakaan. Mereka tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melayani pemustaka penyandang disabilitas, misalnya bagaimana berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, kemampuan membaca huruf *braille*, dan lain-lain, sehingga hambatan komunikasi antara mereka dengan para pemustaka penyandang disabilitas sangat mungkin terjadi. Hal tersebut berpotensi menyulitkan terwujudnya aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas.

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, sudah selayaknya institusi ini melakukan inovasi, tidak sekedar menunggu naiknya dana dari APBD belaka. Langkah yang bisa dilakukan antara lain berani melakukan diskresi, yang mana diskresi sendiri adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya Tindakan-tindakan administrasi negara itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Mustamu, 2011). Salah satu langkah yang bisa dilakukan berkaitan dengan terbatasnya dana misalnya melakukan kerja sama dengan pihak swasta

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai aksesibilitas pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Aksesibilitas Pemustaka Penyandang Disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berhasil mewujudkan aksesibilitas yang baik bagi para pemustaka penyandang disabilitas, hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti kemudahan pemustaka dalam memenuhi kebutuhannya belum sepenuhnya terwujud dan koleksi bahan pustaka yang tersedia hanya buku dengan cetakan *braille*.

#### 2. Aksesibilitas Pemustaka Penyandang Disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar IFLA Checklist

Aksesibilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat berdasarkan Standar IFLA Checklist mencapai angka 40,54%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aksesibilitas bagi pemustaka penyandang disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

masih belum sesuai dengan standar IFLA *Checklist*. Hasil penelitian dari standar IFLA *Checklist* yang berjumlah 111 item yang sesuai terdapat 45 item sedangkan tidak sesuai terdapat 66 item.

### 3. Kendala Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat

Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pemenuhan aksesibilitas pemustaka difabel dari berbagai aspek seperti minimnya pendanaan yang tersedia, kurangnya pengetahuan teknis pelaksanaan, dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompentensi dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus atau difabel dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

#### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut: (1) Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pustakawan dibidang pelayanan difabel; (2) Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dan akses fisik perpustakaan yang sesuai dengan standar IFLA; (3) Perpustakaan diharapkan dapat melakukan layanan dan komunikasi dengan pihak individu atau organisasi difabel melalui pertemuan rutin; (4) Perpustakaan diharapkan dapat bekerjasama dengan individu atau organisasi difabel; (5) Perpustakaan diharapkan dapat melakukan inovasi seperti disreksi, atau bertindak atas inisiatif sendiri namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya melakukan kerja sama dengan pihak swasta.

## **REFERENSI**

- Batley, S. (2007). *Information Architecture for Information Professionals*. England: Chandos Publishing.
- Church, R. L., & Marston, J. R. (2003). Measuring accessibility for people with a disability. *Geographical Analysis*, 35(1), 83-96.
- Lasa, A. (2013). Perpustakaan Umum dalam Pendidikan Seumur Hidup. *Jurnal Perpustakaan Umum*, 5(2), 17-25.
- Moleng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Putri, G. H. (2011). *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 16.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. (2008). Perpustakaan Umum sebagai Layanan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 10(3), 165-175.